



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS TRI WIDYANTARA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 478639

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 531.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m²/200 m² di BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 268.000.000
2. Tanah Seluas 114 m² di BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 223 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000
4. Tanah Seluas 1718 m² di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 916 m² di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
5. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	123.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.134.000.000
III. HUTANG	Rp.	92.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.042.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.